



KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM TAFSIR TAMSYYIYATUL MUSLIMIN KARYA KH. AHMAD SANUSI: ANALISIS QS. AN-NISA': 59 DAN RELEVANSINYA BAGI KEPEMIMPINAN ISLAM DI INDONESIA

1* Abdul Rohim, Nia Ismawati

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*E-mail: rohim2876@gmail.com

Received: 14-05-2025

Accepted: 16-05-2026

Published: 17-05-2026

Abstract

The concept of Islamic leadership continues to be debated in both classical and contemporary scholarship, particularly in the Indonesian context where ulama have developed contextual interpretations that respond to local socio-political realities. KH. Ahmad Sanusi (1888-1950), one of the most prolific ulama of the Nusantara tradition, produced a tafsir known as Tamsyiyatul Muslimin that offers a distinctive interpretation of QS. An-Nisa': 59 the Qur'anic verse most frequently cited in discussions of Islamic leadership. This study aims to analyze Sanusi's conception of ulil amri as articulated in Tamsyiyatul Muslimin, examine the ethical-sufistic foundations that underpin his leadership thought, and assess the contemporary relevance of his ideas for Indonesian Islamic leadership. The research employs a qualitative library research method with textual and contextual analysis of Tamsyiyatul Muslimin as the primary source, supplemented by relevant works in tafsir studies, Islamic leadership theory, and the intellectual biography of KH. Ahmad Sanusi. Four major findings emerge. First, Sanusi interpreted ulil amri as encompassing both religious leaders (ulama) and socio-political leaders (umara), with equal emphasis on their moral and scholarly qualifications. Second, his ethical-sufistic (tasawuf akhlaki) orientation positioned leadership as a spiritual amanah requiring tazkiyatun nafs as a prerequisite for just governance. Third, he maintained that obedience to leaders is conditional, suspended when commands contradict divine and prophetic authority, a position that had clear anti-colonial implications in his historical context. Fourth, his emphasis on musyawarah (consultation) as the primary mechanism for conflict resolution reflects a proto-democratic understanding of Islamic governance that remains highly relevant to contemporary Indonesia. The article concludes that Sanusi's leadership concept represents a significant contribution to the tradition of Nusantara tafsir and offers valuable ethical-theological resources for contemporary Islamic leadership discourse in Indonesia.

Keywords: *Islamic Leadership, Kh. Ahmad Sanusi, Tamsyiyatul Muslimin, Qs. An-Nisa': 59, Nusantara Tafsir.*

Abstrak

Konsep kepemimpinan Islam terus menjadi perdebatan dalam kajian klasik maupun kontemporer, khususnya di Indonesia di mana para ulama telah mengembangkan penafsiran kontekstual yang merespons realitas sosial-politik lokal. KH. Ahmad Sanusi (1888-1950), salah satu ulama Nusantara paling produktif, menghasilkan tafsir Tamsyiyatul Muslimin yang menawarkan penafsiran khas terhadap QS. An-Nisa': 59, ayat Al-Qur'an yang paling sering dikutip dalam diskusi kepemimpinan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsepsi ulil amri KH. Ahmad Sanusi dalam Tamsyiyatul Muslimin, mengkaji fondasi etis-sufistik yang menopang pemikiran kepemimpinannya, dan menilai relevansi kontemporer gagasannya bagi kepemimpinan Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan kualitatif dengan analisis tekstual dan kontekstual terhadap Tamsyiyatul Muslimin sebagai sumber primer, dilengkapi karya-karya kajian tafsir, teori kepemimpinan Islam, dan biografi intelektual KH. Ahmad Sanusi. Empat temuan utama dihasilkan: (1) Sanusi menafsirkan ulil amri sebagai mencakup pemimpin agama (ulama) dan sosial-politik (umara) dengan penekanan setara pada kualifikasi moral dan keilmuan mereka; (2) orientasi tasawuf akhlaki-nya menempatkan kepemimpinan sebagai amanah



spiritual yang mensyaratkan tazkiyatun nafs sebagai prasyarat tata kelola yang adil; (3) ia menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat bersyarat, gugur ketika perintah bertentangan dengan otoritas ilahi dan kenabian, sebuah posisi yang memiliki implikasi anti-kolonial yang jelas; dan (4) penekanannya pada musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik mencerminkan pemahaman proto-demokratis tentang pemerintahan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep kepemimpinan Sanusi merupakan kontribusi signifikan bagi tradisi tafsir Nusantara dan menyediakan sumber daya etis-teologis yang berharga bagi diskursus kepemimpinan Islam kontemporer di Indonesia.

Kata Kunci: Kepemimpinan Islam, Kh. Ahmad Sanusi, Tamsiyatul Muslimin, Qs. An-Nisa': 59, Tafsir Nusantara.

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan salah satu persoalan paling fundamental dalam pemikiran politik dan sosial Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer, pertanyaan tentang siapa yang berhak memimpin, apa sifat-sifat yang harus dimilikinya, dan bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin telah melahirkan perdebatan intelektual yang kaya dan kompleks. Al-Qur'an tidak memberikan blueprint kepemimpinan yang rinci, tetapi menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi para mufasir untuk membangun konsepsi kepemimpinan yang kontekstual sesuai dengan realitas zaman dan tempat mereka (Srifariyati & Nugraha, 2019).

Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam diskursus kepemimpinan Islam adalah QS. An-Nisa': 59. Ayat ini menetapkan tiga lapis otoritas yang harus ditaati: Allah, Rasul, dan ulil amri. Konsep ulil amri inilah yang menjadi pusat perdebatan di antara para ulama: apakah ia merujuk kepada pemimpin politik semata, kepada para ulama, atau kepada setiap pemegang otoritas yang sah? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga memiliki implikasi sosial-politik yang sangat konkret bagi kehidupan umat Islam di berbagai konteks sejarah.

Dalam tradisi tafsir Nusantara, KH. Ahmad Sanusi (1888-1950) adalah salah satu figur yang paling layak mendapat perhatian dalam konteks ini. Ia adalah ulama Sukabumi yang luar biasa produktif, menulis lebih dari 400 karya yang mencakup tafsir, fikih, tasawuf, akidah, dan pemikiran sosiopolitik (Gusmian, 2021). Di antara karya-karya tafsirnya, Tamsiyatul Muslimin memiliki keistimewaan tersendiri: ditulis dalam bahasa Melayu-Indonesia dengan aksara Latin pada tahun 1934, ia menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dibanding karya-karya tafsir berbahasa Arab atau Pegon Sunda. Corak tasawuf akhlaki yang mewarnai seluruh tafsirnya memberikan dimensi etis-spiritual yang khas pada pemahaman Sanusi tentang kepemimpinan.

Kajian tentang pemikiran KH. Ahmad Sanusi telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah semakin diakuinya tradisi tafsir Nusantara sebagai warisan intelektual Islam Indonesia yang perlu digali lebih serius. Rahman, Yunus, dan Zulaiha (2020) telah mengkaji corak tasawuf dalam kitab-kitab tafsirnya secara komprehensif. Saleh (2019) telah mendokumentasikan kontribusinya dalam tradisi literasi Islam Nusantara. Namun, kajian yang secara khusus dan sistematis menganalisis konsep kepemimpinannya melalui lensa QS. An-Nisa': 59 dan menghubungkannya secara eksplisit dengan relevansi kontemporer masih perlu diperkuat. Kesenjangan inilah yang menjadi justifikasi akademis artikel ini.

Novelty artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini menganalisis konsep ulil amri Sanusi tidak hanya sebagai produk hermeneutika klasik, tetapi juga sebagai respons intelektual terhadap konteks kolonialisme yang ia alami, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika tafsir Nusantara. Kedua, artikel ini menunjukkan bagaimana tasawuf akhlaki Sanusi berfungsi bukan hanya sebagai orientasi spiritual personal, melainkan sebagai epistemologi kepemimpinan yang memiliki implikasi sosial-politik konkret. Ketiga, artikel ini merumuskan relevansi kontemporer pemikiran Sanusi bagi tantangan kepemimpinan Islam di Indonesia modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan: (1) menganalisis penafsiran Sanusi terhadap QS. An-Nisa': 59 dan konsep ulil amri dalam Tamsiyatul Muslimin; (2) mengkaji fondasi tasawuf akhlaki yang menopang pemikiran kepemimpinannya; serta (3) menilai relevansi gagasannya bagi kepemimpinan Islam kontemporer di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena objek kajiannya adalah teks tafsir beserta konteks intelektual dan sosio-historis yang melingkupinya, sehingga membutuhkan analisis tekstual yang mendalam sekaligus pemahaman kontekstual yang memadai (Shihab, 2013; Al-Shalih, 2000). Sumber data primer adalah kitab Tamsiyatul Muslimin karya KH. Ahmad Sanusi, khususnya penafsiran terhadap QS. An-Nisa': 59 dan ayat-ayat terkait kepemimpinan. Sumber sekunder meliputi karya-karya biografi intelektual Sanusi, kajian-kajian tentang tafsir Nusantara, literatur kepemimpinan Islam klasik dan kontemporer, serta penelitian akademis yang relevan. Analisis data dilakukan melalui dua tahap: pertama, validasi teks yang memastikan kutipan dan penafsiran bersumber langsung dari kitab primer; kedua, klasifikasi dan analisis isi tafsir yang mengidentifikasi tema-tema kepemimpinan, corak penafsiran, dan posisi Sanusi dalam wacana ulil amri. Seluruh temuan kemudian

disintesis secara interpretatif untuk menghasilkan rekonstruksi konsep kepemimpinan Sanusi yang koheren.

Hasil dan Pembahasan

KH. Ahmad Sanusi: Biografi Intelektual dan Konteks Historis

Memahami penafsiran KH. Ahmad Sanusi terhadap QS. An-Nisa': 59 tidak dapat dilepaskan dari biografi intelektual dan konteks historis yang membentuknya. KH. Ahmad Sanusi lahir pada 1888 di Cantayan, Sukabumi, Jawa Barat, dalam keluarga ulama yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat. Ia menempuh pendidikan pesantren yang mendalam di beberapa pesantren terkemuka sebelum memperdalam ilmu di Mekkah, di mana ia bersentuhan dengan arus pemikiran reformasi Islam dari Timur Tengah. Sepulang dari Mekkah, ia mendirikan pesantren Syamsul Ulum di Cantayan dan menjadi ulama yang sangat berpengaruh di wilayah Sunda (Gusman, 2021).

Konteks kolonialisme Belanda memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk pemikiran Sanusi, termasuk pemikirannya tentang kepemimpinan. Ia pernah diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Batavia (1927-1931) karena dianggap sebagai tokoh yang membahayakan ketertiban kolonial. Pengalaman pengasingan ini tidak melemahkan, tetapi justru memperdalam komitmennya terhadap perlawanan intelektual dan dakwah melalui tulisan. Tamsiyatul Muslimin ditulis sebagian besar selama periode ini sebagai sarana dakwah kepada masyarakat umum yang tidak dapat mengakses pesantren akibat penindasan kolonial (Saleh, 2019).

Keterlibatan Sanusi dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1945 merupakan ekspresi nyata dari hubungan antara pemikiran tafsirnya dengan visi politiknya. Ia mengusulkan konsep imamah sebagai salah satu dasar negara Indonesia merdeka, sebuah proposal yang mencerminkan keyakinannya bahwa kepemimpinan yang legitimate harus bertumpu pada prinsip-prinsip Islam yang ia elaborasi dalam tafsirnya. Meskipun proposalnya tidak diterima secara formal, kontribusinya menunjukkan bahwa Tamsiyatul Muslimin bukan hanya karya hermeneutika keagamaan, tetapi juga manifesto intelektual tentang bagaimana Islam harus memandu tatanan sosial-politik.

Karakteristik Tafsir Tamsiyatul Muslimin

Tamsiyatul Muslimin memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari karya tafsir Nusantara lainnya dan relevan untuk dipahami sebelum menganalisis penafsirannya tentang kepemimpinan. Pertama, dari segi bahasa, ia ditulis dalam

bahasa Melayu-Indonesia dengan aksara Latin, sebuah pilihan yang sangat disengaja untuk menjangkau masyarakat Muslim yang tidak menguasai aksara Arab atau Pegon. Ini adalah strategi demokratisasi pengetahuan tafsir yang maju untuk zamannya (Saleh, 2019). Kedua, dari segi metode, Sanusi menggunakan metode ijmalî (global) yang menjelaskan makna ayat secara keseluruhan tanpa terlalu terlarut dalam perdebatan teknis linguistik, sehingga penafsirannya lebih mudah dipahami oleh pembaca awam. Ketiga, dari segi corak, tafsir ini didominasi oleh corak tasawuf akhlaki yang menempatkan pembinaan moral dan spiritual sebagai tujuan utama pemahaman Al-Qur'an (Rahman, Yunus & Zulaiha, 2020).

Tasawuf akhlaki Sanusi perlu dipahami secara tepat agar tidak disalahartikan sebagai sufisme yang hanya berorientasi ke dalam diri dan mengabaikan realitas sosial. Bagi Sanusi, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang mendorong moralitas sosial, pembinaan akhlak kolektif, dan pembersihan jiwa sebagai prasyarat partisipasi aktif dalam kehidupan sosial-politik. Ia bukan sufi yang menyepi dari dunia; ia adalah ulama yang terlibat penuh dalam dinamika sosial dan politik zamannya sambil mempertahankan orientasi spiritual yang kuat. Corak tasawuf ini secara langsung memengaruhi cara ia memahami kepemimpinan: pemimpin yang sejati bukan semata-mata pemilik kekuasaan, melainkan pribadi yang telah menjalani tazkiyatun nafs dan karena itu layak mengemban amanah.

Analisis Penafsiran QS. An-Nisa': 59 dalam Tamsiyatul Muslimin

QS. An-Nisa': 59 merupakan ayat kunci dalam penafsiran Sanusi tentang kepemimpinan. Berikut adalah teks ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya."

Sanusi mengidentifikasi struktur hierarkis dalam ayat ini dengan cermat. Ia mencatat bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul menggunakan kata kerja yang berulang (athi'u), sementara perintah taat kepada ulil amri tidak diulang. Ini bukan kebetulan linguistik; ia merupakan sinyal gramatikal yang mengindikasikan bahwa

ketaatan kepada ulil amri bersifat subordinat dan bersyarat, yakni mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dengan kata lain, ulil amri hanya wajib ditaati selama mereka tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul (Ilyas, 2014).

Dalam menafsirkan siapa yang dimaksud dengan ulil amri, Sanusi mengambil posisi yang inklusif dan kontekstual. Berbeda dari sebagian mufasir yang membatasi ulil amri hanya pada pemimpin politik, Sanusi memaknainya secara luas sebagai mencakup pemimpin agama (ulama) dan pemimpin sosial-politik (umara). Keduanya memiliki legitimasi dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi: ulama menjaga kemurnian syariat dan membimbing pemahaman agama, sementara umara mengatur urusan kemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang dijaga ulama. Dualisme ini mencerminkan pemahaman Sanusi tentang perlunya integrasi antara otoritas keagamaan dan otoritas politik dalam kepemimpinan Islam yang ideal.

Aspek paling signifikan dari penafsiran Sanusi adalah penegasannya tentang kondisionalitas ketaatan kepada ulil amri. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa ketaatan gugur ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan atau bertindak bertentangan dengan syariat. Posisi ini selaras dengan konsensus para mufasir klasik seperti al-Qurthubi dan Ibn Katsir, namun dalam konteks Sanusi ia memiliki dimensi tambahan yang sangat spesifik: resistensi terhadap kekuasaan kolonial yang menindas. Bagi Sanusi, pemerintah kolonial Belanda yang melarang dakwah, mengasingkan ulama, dan menindas rakyat Muslim jelas tidak memenuhi kriteria ulil amri yang wajib ditaati. Penafsiran ini menjadi justifikasi teologis bagi perlawanan tanpa kekerasan yang ia lakukan melalui jalur dakwah dan penulisan (Gusmian, 2021).

Bagian kedua ayat tentang pengembalian perselisihan kepada Allah dan Rasul ditafsirkan Sanusi sebagai kewajiban menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi dalam setiap perselisihan. Ia mengaitkan ini dengan pentingnya musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang berpijak pada wahyu. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, Sanusi memandang musyawarah bukan hanya sebagai prosedur pengambilan keputusan, tetapi sebagai ekspresi dari prinsip persatuan umat yang berlandaskan syariat. Pandangan ini selaras dengan apa yang kemudian menjadi salah satu sila dalam Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat.

Fondasi Tasawuf Akhlaki dalam Konsep Kepemimpinan Sanusi

Corak tasawuf akhlaki Sanusi menghasilkan konsepsi kepemimpinan yang memiliki dimensi etis-spiritual yang membedakannya dari teori kepemimpinan yang

semata-mata bertumpu pada kecakapan teknis atau legitimasi formal. Dalam kerangka Sanusi, pemimpin yang sejati bukan hanya pemimpin yang kompeten secara teknis dan memiliki legitimasi prosedural, tetapi juga pemimpin yang telah menjalani proses pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*) yang memungkinkannya bertindak dari motif yang tulus, bukan dari ambisi kekuasaan.

Kriteria *ulil amri* menurut Sanusi mencakup empat dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi keilmuan: pemimpin harus memahami syariat secara memadai agar dapat memimpin berdasarkan hukum Allah dan tidak terjerumus dalam keputusan yang bertentangan dengan Islam. Kedua, dimensi etis: pemimpin harus adil dalam memutuskan perkara dan bebas dari sifat-sifat tercela yang sering dikecam Sanusi dalam tafsirnya, yaitu sifat munafik, zalim, dan kikir (*bakhil*). Ketiga, dimensi spiritual: pemimpin harus memiliki kedekatan dengan Allah melalui ibadah dan kehidupan spiritual yang konsisten, karena tanpa landasan spiritual, kekuasaan mudah disalahgunakan. Keempat, dimensi sosial: pemimpin harus berkomitmen terhadap kemaslahatan umat (*mashlahah al-ummah*) sebagai tujuan utama kepemimpinan, bukan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Sanusi menggunakan istilah *tamsiyah* dalam judul kitabnya secara sangat disengaja. Kata ini bermakna 'penyucian' atau 'pendidikan', menunjukkan bahwa tujuan utama tafsirnya bukan hanya memberikan penjelasan tentang makna Al-Qur'an, melainkan mendidik dan membersihkan jiwa pembacanya. Dalam konteks kepemimpinan, *tamsiyah* berarti bahwa kepemimpinan yang sejati harus bermuara pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, bukan pada penundukan dan eksploitasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadikan rakyatnya lebih berilmu, lebih bermoral, dan lebih mandiri setelah dipimpinya.

Kecaman Sanusi terhadap sifat-sifat tercela seperti kemunafikan, kezaliman, dan kikir dalam tafsirnya berfungsi sebagai instrumen pedagogis untuk membentuk standar moral kepemimpinan yang tinggi. Dengan mengidentifikasi sifat-sifat yang menjadi penyebab kerusakan sosial, ia sekaligus mendefinisikan secara negatif apa yang tidak boleh dimiliki pemimpin. Pemimpin yang munafik akan menghancurkan kepercayaan; pemimpin yang zalim akan merusak keadilan; pemimpin yang kikir tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan umat. Ketiganya, dalam pandangan Sanusi, merupakan antitesis dari pemimpin yang amanah.

Relevansi Konsep Kepemimpinan Sanusi bagi Indonesia Kontemporer

Lebih dari tujuh dekade setelah wafatnya, pemikiran kepemimpinan KH. Ahmad Sanusi tetap memiliki relevansi yang signifikan bagi konteks kepemimpinan Islam di

Indonesia modern. Relevansi ini dapat diidentifikasi dalam empat dimensi. Pertama, konsep ketaatan bersyarat yang dikembangkan Sanusi memberikan landasan teologis yang kuat bagi pemahaman tentang oposisi loyal (loyal opposition) dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, warga negara memiliki hak bahkan kewajiban untuk mengkritisi pemimpin yang menyimpang dari kebenaran. Konsep Sanusi tentang gugurnya kewajiban taat kepada pemimpin yang zalim sejalan dengan prinsip check and balance yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional. Ulama dan intelektual Muslim Indonesia dapat menggunakan kerangka ini untuk melegitimasi peran kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umum.

Kedua, penekanan Sanusi pada musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan memiliki korespondensi langsung dengan sila keempat Pancasila. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan oleh para ulama Nusantara, termasuk Sanusi, tidak terputus dari prinsip-prinsip yang menjadi fondasi negara Indonesia. Kesesuaian ini bukan kebetulan; ia mencerminkan fakta bahwa para pendiri bangsa, banyak di antaranya berlatar belakang Islam, mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam desain institusional Indonesia meskipun tidak menggunakan bahasa agama secara formal.

Ketiga, konsepsi Sanusi tentang pemimpin sebagai pendidik dan pemberdaya masyarakat sangat relevan dengan tantangan kepemimpinan di era demokrasi yang sering kali terdegradasi menjadi perlombaan kekuasaan tanpa visi transformatif. Pemimpin yang menjadikan tamsiyah atau pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan kepemimpinan akan menghasilkan legacy yang jauh lebih bermakna dibanding pemimpin yang hanya fokus pada retensi kekuasaan. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang menjadi agenda strategis Indonesia, visi kepemimpinan berbasis pendidikan yang ditawarkan Sanusi sangat relevan.

Keempat, dimensi spiritual kepemimpinan yang ditekankan Sanusi melalui konsep tazkiyatun nafs menawarkan antidot terhadap patologi kepemimpinan yang paling merusak, yaitu korupsi moral yang lahir dari motif kepemimpinan yang tidak bersih. Pemimpin yang menjalani proses pembersihan jiwa secara konsisten akan lebih tahan terhadap godaan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia yang masih berjuang melawan korupsi sistemik, rekomendasi Sanusi tentang kepemimpinan yang bertumpu pada integritas spiritual bukan sekadar idealisme religius, melainkan strategi praktis untuk membangun kepemimpinan yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa KH. Ahmad Sanusi, melalui tafsir Tamsiyatul Muslimin, mengembangkan konsep kepemimpinan Islam yang memiliki kedalaman teologis, kecanggihan etis, dan relevansi kontekstual yang signifikan. Melalui analisis penafsiran QS. An-Nisa': 59, empat temuan utama teridentifikasi: penafsiran ulil amri yang inklusif mencakup ulama dan umara; fondasi tasawuf akhlaki yang menempatkan tazkiyatun nafs sebagai prasyarat kepemimpinan yang adil; konsep ketaatan bersyarat yang memiliki implikasi anti-kolonial yang jelas; serta penekanan pada musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan yang berpijak pada wahyu.

Kontribusi ilmiah utama artikel ini adalah rekonstruksi konsep kepemimpinan Sanusi sebagai sistem yang koheren, yang menghubungkan dimensi hermeneutika, tasawuf, dan sosio-politik secara integratif. Artikel ini juga menunjukkan bahwa tafsir Nusantara bukan sekadar adaptasi lokal dari tafsir Timur Tengah, melainkan produk intelektual yang memiliki orisinalitas dan relevansi yang khas sesuai dengan konteks sosio-historis Indonesia.

Dua agenda penelitian lanjutan direkomendasikan. Pertama, kajian komparatif antara konsep ulil amri Sanusi dengan mufasir Nusantara lainnya seperti Hamka dalam Al-Azhar dan M. Quraish Shihab dalam Al-Misbah, guna mengidentifikasi kekhasan dan kesamaan dalam tradisi tafsir kepemimpinan Indonesia. Kedua, penelitian tentang pengaruh pemikiran kepemimpinan Sanusi terhadap organisasi-organisasi Islam dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan yang berinteraksi langsung dengannya, guna memetakan warisan intelektualnya secara lebih komprehensif dalam sejarah pemikiran Islam Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Shalih, S. (2000). *Mabahith fi 'ulum al-Qur'an*. Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Akbar, N. (2021). *Kepemimpinan yang membimbing: Kajian nilai-nilai Islam*. Pustaka Ilmu.
- Armando, N. M. (Ed.). (2005). *Ensiklopedi Islam (Vol. 6)*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Gusmian, I. (2021). *Khazanah tafsir Al-Qur'an Indonesia: Dari hermeneutika hingga ideologi*. Kementerian Agama RI.
- Ibn Katsir, I. (t.t.). *Tafsir al-Qur'an al-'azhim (Vol. 1-4)*. Dar al-Hadits.
- Ilyas, Y. (2014). *Ulil amri dalam tinjauan tafsir*. *Jurnal Tarjih*, 12(1), 42-58.

Abdul Rohim, Nia Ismawati

Konsep Kepemimpinan dalam Tafsir Tamsiyatul Muslimin Karya Kh. Ahmad Sanusi: Analisis Qs. An-Nisa': 59 dan Relevansinya Bagi Kepemimpinan Islam di Indonesia

- Juwariyah. (2008). Pendidikan moral dalam puisi Imam Syafi'i dan Ahmad Syauqi. Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Rahman, A., Yunus, M. B., & Zulaiha, E. (2020). Corak tasawuf dalam kitab-kitab tafsir karya KH. Ahmad Sanusi. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(2), 161-178.
- Sagala, H., & Purba, H. (2021). Pemimpin dan kepemimpinan. Yayasan Kita Menulis.
- Saleh, M. (2019). KH. Ahmad Sanusi dan karya-karyanya: Khasanah literasi ilmu-ilmu ajaran Islam di Nusantara. *Jurnal at-Tadbir*, 29(2), 74-114.
- Shihab, M. Q. (2013). Kaedah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut Anda ketahui. Lentera Hati.
- Srifariyati & Nugraha, A. S. (2019). Prinsip kepemimpinan dalam perspektif QS. An-Nisa': 58-59. *Madaniyah: Jurnal Kajian Islam*, 9(2), 283-301.